

SKRIPSI

**ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT
PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU**
(Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)

***ANALYSIS OF COMMUNITY CONFLICTS WITH PERHUTANI DUE TO
FORESTRY LAND TAKING IN DOMPU DISTRICT***

(Case Study In Soriutu village Manggelewa Subdistrict Dompu Regency)

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

YENDRI SAPUTRA

NIM: 217110063

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020-2021**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT
PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU**
(Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus)

Oleh:

YENDRI SAPUTRA
NIM: 217110063

Untuk Memenuhi Ujian Skripsi Pada Tanggal 21 Juli 2021

Menyetujui:

Dosen pembimbing I

Dr.H.Ibrahim Abdullah, MM
NIDN:0830125501

Dosen pembimbing II

Abdul Hafiz, S.Sos.I.,M.Pd.I
NIDN:0810097105

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN:0822048901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT
PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU
(Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)

Oleh :

YENDRI SAPUTRA
NIM : 217110063

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Telah dipertahankan di depan penguji Skripsi pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Dr.H.Ibrahim H.Abdullah, M.M**
NIDN. 0830125501

(PU) (.....)

2. **Abdul Hafiz, S.Sos.i.,M.Pd.I**
NIDN. 0810097105

(PP) (.....)

3. **M. Taufik Rachman, SH., MH**
NIDN. 0825078701

(PN) (.....)

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik


✓ **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan dokter) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telas di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh dari karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 14 Juli 2021



YENDRI SAPUTRA
NIM:217110063



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yendri Saputra
NIM : 217110063
Tempat/Tgl Lahir : Dompu 12 November 1997
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085-238 072 725 / yendritribull97@gmail.com
Judul Penelitian : -

ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT
PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU
(studi kasus di desa soriutu kecamatan manggalewa kabupaten
Dompu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021



Penulis
YENDRI SAPUTRA
NIM. 217110063

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yendri Saputra
NIM : 217.110.063
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 12 November 1997
Program Studi : Adm. Publik
Fakultas : FISIPO
No. Hp/Email : 085.238.072.725 / yendritriball97@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Konflik Masyarakat Dengan Perhutani Akibat
Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu
(Studi Kasus di Desa Soritu Kecamatan Manggelewa
Kabupaten Dompu)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



YENDRI SAPUTRA
NIM. 217.110.063

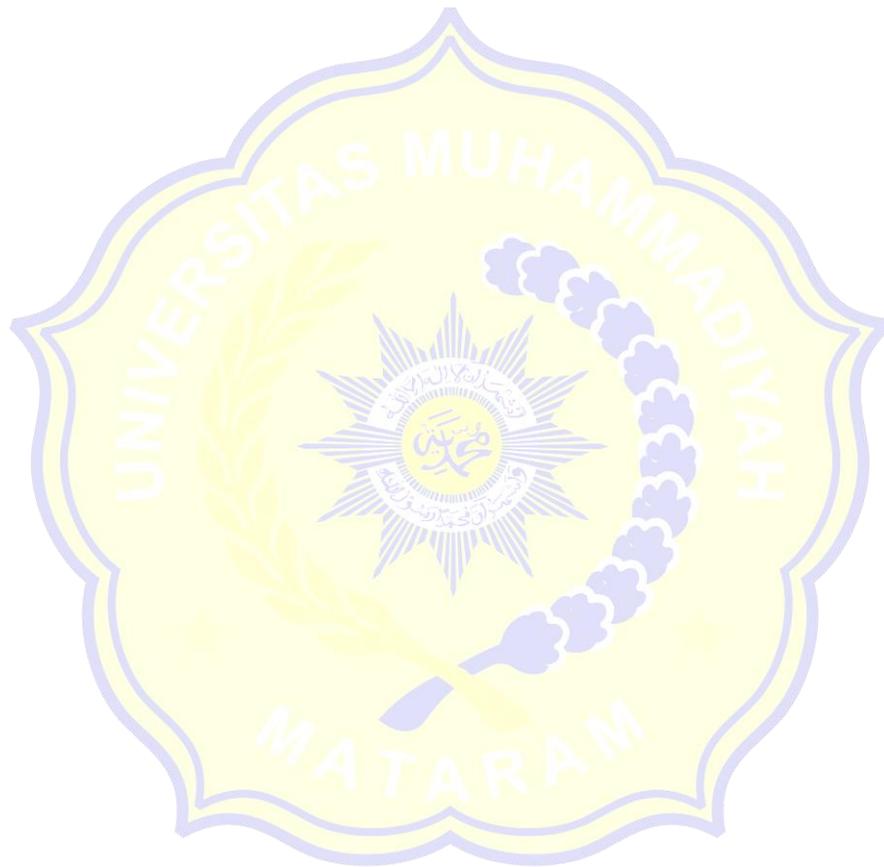
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“SUKSES ADALAH SAAT PERSIAPAN DAN KESEMPATAN BERTEMU”

YENDRI SAPUTRA

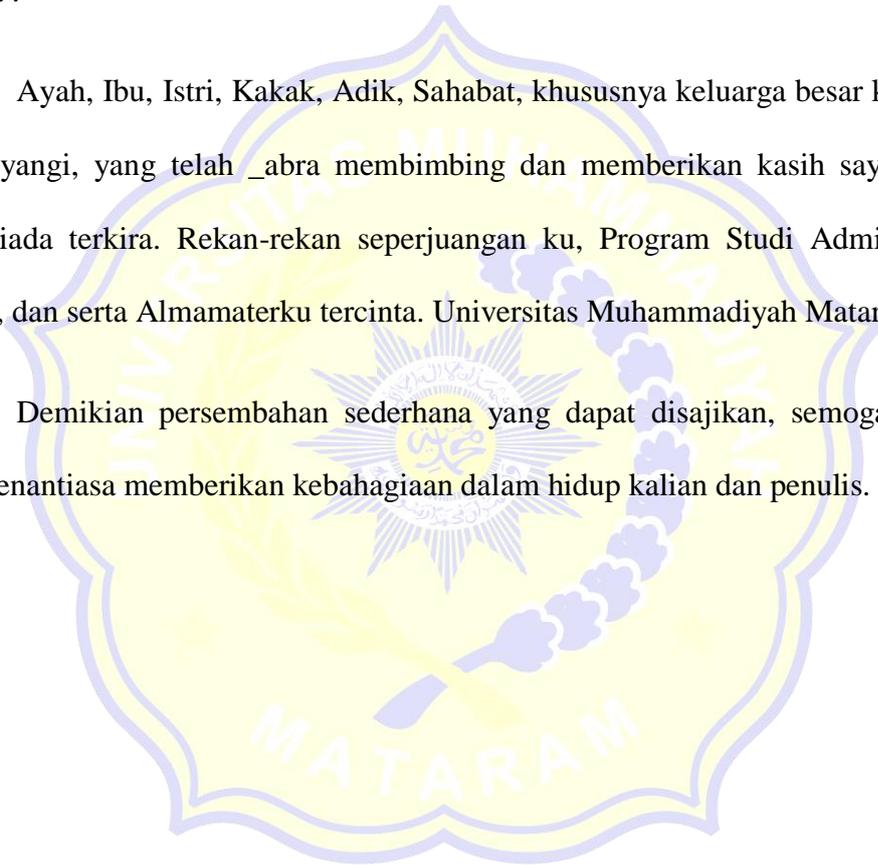


HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Karena atas segala nikmat dan karunianya karya ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini dipersembahkan kepada :

Ayah, Ibu, Istri, Kakak, Adik, Sahabat, khususnya keluarga besar ku yang aku sayangi, yang telah _abra membimbing dan memberikan kasih sayangnya yang tiada terkira. Rekan-rekan seperjuangan ku, Program Studi Administrasi Publik, dan serta Almamaterku tercinta. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian persembahan sederhana yang dapat disajikan, semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis.



**Analisis Konflik Masyarakat dengan Perhutani akibat
Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu (Studi Kasus di Desa
Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu 2020-2021)**

Yendri Saputra¹, Dr.H.Ibrahim Abdullah, MM², Abdul Hafiz, S.Sos.I.,M.Pd.I³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Konflik sosial merupakan konflik realistik karena bersumber dari masyarakat dan ada pihak yang dirugikan. Perjanjian dengan Perum Perhutani Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi mengecewakan dan meresahkan masyarakat. Sementara itu, masyarakat sudah menjadikan lahan hutan lindung tersebut sebagai kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dibiarkan maka konflik akan semakin membesar dan tidak menutup kemungkinan adanya bentrokan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi, wawancara, teknik analisis data melalui langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak kehutanan menjadi bentuk intimidasi kehidupan bagi kedua belah pihak. Konflik itu berupa klaim masyarakat tani atas penggunaan lahan perhutanan memiliki alasan hak berupa Hak yang amanatkan oleh UUD 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ayat B Tahun 2007 masyarakat mengandalkan bahwa penggunaan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu mereka menganggap bahwa tanah telah dimiliki secara turun-temurun. Aksi-aksi yang terjadi diantaranya masyarakat kerap kali menghadang aparat kehutanan yang sedang melaksanakan tugas. Status kepemilikan hak penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian masih dianggap ilegal tentu hal menjadi salah satu faktor pemicu konflik antara masyarakat tani dengan pihak kehutanan setempat.

Kata Kunci: Konflik Masyarakat Dan Kehutanan

**Analysis of Community Conflict with Perhutani due to Forest Land Taking in
Dompu Regency (A Case Study in Soriutu Village, Manggelewa District, Dompu
Regency 2020-2021)**

Yendri Saputra¹, Dr.H.Ibrahim Abdullah, MM², Abdul Hafiz, S.Sos.I.,M.Pd.I
Student¹, First Consultant², Consultant³
Public Administration Study Program, Faculty Of Politic and Social Science
Muhammadiyah University of Mataram

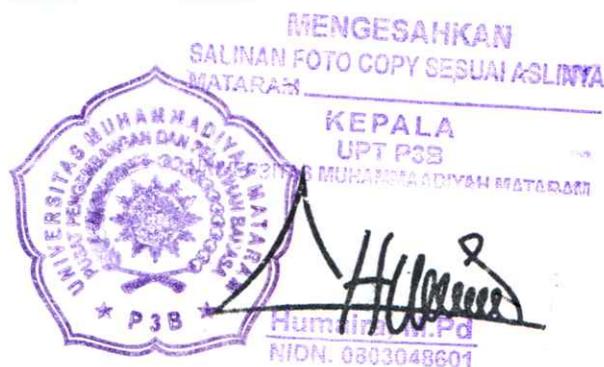
ABSTRACT

Social conflict is an actual conflict because it originates from the community, and some parties are disadvantaged. The community was disappointed and unsettled by Perum Perhutani Forest Management Unit Agency (BKPH) Toffo Pajo Soromandi. In the meantime, the community has made the protected forest land one of their most basic needs. If this is allowed, the conflict will grow in size, and clashes are a distinct possibility.

The qualitative research method was used in this study. Observation, documentation, and interviews are part of data collection techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The study concluded the conflict between the community and the forestry party is a form of intimidation of life for both parties. The conflict is in the form of claims by the farming community over the use of forested lands having rights reasons in the form of rights mandated by the 1945 Constitution, Government Regulation Number 6 Paragraph B of 2007. To meet its economic needs, the community relies on the use of the land. They also assume that the land has been in their family for generations. The community frequently confronted forestry officials who were carrying out their duties in the course of their actions. The ownership of land use rights for agricultural purposes is still regarded as illegal. One of the factors that contribute to conflict between farming communities and local forestry groups is this.

Keywords: Community Conflict and Forestry



KATA PENGANTAR

Segalah Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "*Analisis Konflik Masyarakat Dengan Perhutani Akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu*". Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata I di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Ibrahim Abdullah, M.M sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hafiz, S.Sos.I., M.Pd.I sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan berbagai macam saran dan kritikan sehingga Skripsi ini berjalan dengan benar.
6. Orang tua peneliti yang selalu memberikan Doa dan motivasi serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

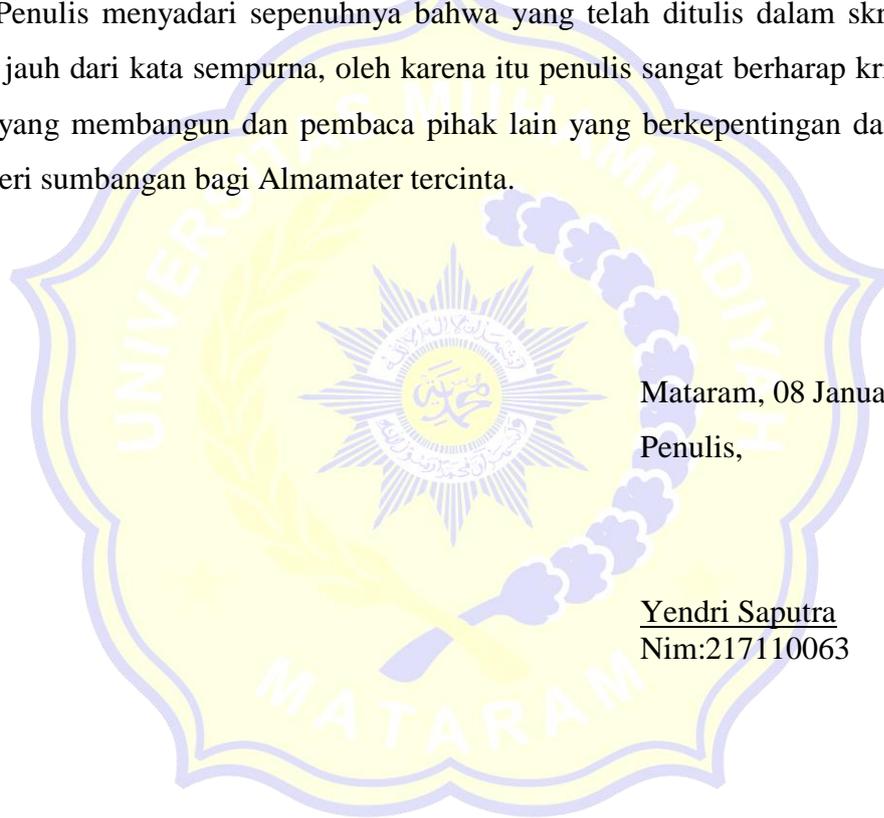
7. Terima kasih juga untuk istri tercinta Irman Fitriani yang selalu memberikan motivasi, doa serta dukungan semangat bagi saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dan semua pihak yang telah memberikan masukan dorongan serta semangat motivasi bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah ikhlas memberi doa dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah ditulis dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dan pembaca pihak lain yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan bagi Almamater tercinta.

Mataram, 08 Januari 2021

Penulis,

Yendri Saputra
Nim:217110063



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Penentuan Informan	22
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Teknik Analisis data.....	26
3.7 Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1	Gambaran umum lokasi penelitian	29
4.1.1	Profil desa soriutu	29
4.1.2	Profil Resort Soriutu BKPH Toffo Pajo Soromandi.....	41
4.2	Konflik masyarakat Desa Soriutu dengan Perhutani Akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Penduduk Desa Soriutu menurut kelompok umur dan Janis Kelamin	29
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Soriutu (KK) Tahun 2018.....	31
Tabel 4.3 Jenis Penggunaan Sumber daya air	32
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Soriutu Tahun 2018.....	34
Tabel 4.5 Jenis Sarana Jalan.....	35
Tabel 4.6 Jenis Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2018	37
Tabel 4.7 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Pada Tahun 2018	38
Tabel 4.8 Lembaga Keuangan Mikro Desa	38
Tabel 4.9 Prosentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Soriutu dan Sebarannya pada tahun 2018.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang luas. Hutan Indonesia tersebar di beberapa pulau besar, yaitu pulau Jawa, pulau Sumatera, dan pulau Kalimantan. Hutan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Menurut Kadri (Indriyanto, 2010, hlm. 6), pengertian hutan itu sendiri adalah “bidang yang dipenuhi pepohonan, sebagai suatu kesatuan, perpaduan antara alam hidup dan lingkungan alam atau ekosistemnya”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sosial tidak terlepas dari konflik. Konflik merupakan bagian dari perubahan sosial. Teori konflik Darendrov meyakini bahwa masyarakat selalu dalam perubahan, konflik dan konflik akan selalu terjadi dalam sistem sosial, dan berbagai elemen masyarakat akan menyebabkan disintegrasi dan perubahan (Ritzer dan Douglas, 2010). Teori ini menunjukkan bahwa konflik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Nasikun dalam Nulhaqim, 2017:76).

Sebagai bagian dari perubahan sosial, konflik pada dasarnya merupakan cara untuk membentuk suatu tatanan/konsensus sosial dalam masyarakat. Tatanan yang ada dalam masyarakat ini seringkali datang dari pemaksaan penguasa terhadap anggota di bawahnya dengan menekankan peran kekuasaan dalam

memelihara ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dibentuk oleh konsensus dan konflik merupakan kebutuhan bagi orang lain.

Menurut De Dreu dan Gelfand (2007) dalam Putra (2013: 1), konflik adalah suatu proses ketika seorang individu atau kelompok merasakan adanya perbedaan atau pertentangan antara dirinya dengan individu atau kelompok lain dalam kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai-nilai, atau aspek lain Waktu.Latihan. Berdasarkan definisi konflik tersebut dapat dipahami bahwa konflik terjadi baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kelompok dalam masyarakat (Putra, 2014).

Menurut undang-undang Pasal 1 ayat 1. Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa konflik sosial adalah perselisihan dan/atau konflik kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan memiliki jangkauan pengaruh yang luas serta berubah menjadi gejolak dan /atau konflik kekerasan yang mengganggu stabilitas negara. , Menghambat pembangunan nasional.

Konflik dalam masyarakat dapat bersifat nyata atau laten (Dahrendrof, 1956: 173). Konflik bersifat laten, yaitu jika individu atau kelompok yang terlibat konflik tidak menyadari bentuk kepentingan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa orang sedang berkonflik, tetapi orang-orang ini tidak merasa bahwa mereka sedang mengalami konflik. Benturan yang jelas berarti bahwa bentuk benturan kepentingan yang telah terjadi telah dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkonflik atau orang yang “berkonflik”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di desa Soriutu Kecamatan Manggelewa kabupaten Dompu, terdapat hutan lindung seluas 1073 hektar yang berisi pohon kijang mas, gaharu, beringin dan berbagai jenis pohon lainnya. Menurut pemaparan dari Pak Aidin selaku Kepala Desa Soriutu, pada awalnya masyarakat desa soriutu melakukan perabasan hutan tersebut untuk di jadikan lahan pertanian, tetapi bukan hanya masyarakat desa Soriutu saja yang melakukan perabasan di hutan Tawari tapi banyak masyarakat desa lain juga yang melakukan perabasan di hutan tersebut bahkan banyak masyarakat yang di luar kecamatan Manggelewa “Ungkap kepala desa Soriutu”. Hutan lindung (hutan tawari) tersebut berlokasi sebelah utara desa Tanjung kecamatan manggelewa yang berdekatan dengan kecamatan woja(bagian timur hutan Tawari)dan kecamatan kilo(bagian utara hutan tawari), yang membuat masyarakat desa soriutu melakukan perabasan hutan lindug tersebut dengan berbagai alasan yaitu, karena desakan ekonomi, kebutuhan pokok yang kurang dan banyak pengangguran.

Hampir semua aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan, karena jumlah dan aktivitas manusia meningkat pesat, menjadikan lahan sebagai sumber daya yang langka. Bahkan dalam keadaan yang kurang jelas, keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan dapat membawa keuntungan atau kerugian besar dalam hal aliansi ekonomi dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan penggunaan lahan merupakan aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 di kantor Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terdapat perjanjian antara Perum Perhutani Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi Kecamatan Manggelewa dengan masyarakat Desa Soriutu hal ini terkait dengan pengelolaan konflik kepemilikan (kawasan pemanfaatan tanpa izin) yang menyita perhatian masyarakat. Menurut hasil kesepakatan, lokasi di Hutan Tawari yang terdiri dari 15 Petak Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi harus kembali ke fungsi semula sehingga fungsi-fungsi hutan dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dapat terjaga kelestariannya. Masyarakat yang menjadikan lahan pertanian kawasan hutan lindung tersebut harus secepatnya keluar dari kawasan hutan tawari. Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan pasal 1 no.4 yang diambil dari web resmi Badan Pengawasan dan Pembangunan yang tersedia dalam <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/6/581.bpkp> diakses pada pada hari Senin 17 November 2020 pukul 19.45 WIB. Memaparkan bahwasanya“hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Kesepakatan antara masyarakat dengan Perhutani menimbulkan sengketa tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat bingung mencari lahan pertanian dimana karena sudah mengandalkan ekonomi kawasan hutan lindung untuk mata

pencahariannya. Masyarakat juga meminta kepada Perhutani untuk menyediakan lahan pertanian agar dapat digarap kembali, namun Perhutani tidak mampu menyediakan lahan pertanian alternatif bagi masyarakat. Akhirnya, hingga saat ini, masyarakat masih bertani di kawasan hutan lindung.

Adanya perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat memunculkan pertentangan tersendiri. Terjadinya alih fungsi lahan tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

Dari segi sosiologis, persoalan ini merupakan konflik antara masyarakat dengan Perhutani. Dilihat dari sumber konfliknya, konflik tersebut merupakan konflik vertikal. Maftuh (2008, hlm. 29) menjelaskan bahwa konflik vertikal adalah “konflik antara dua pihak yang berbeda status sosial”. Dalam penelitian ini akan terjadi konflik antar posisi sosial yang berbeda yaitu antara Perhutani dengan masyarakat, Perhutani memiliki kewenangan, sehingga statusnya lebih tinggi dari masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Maftuh (2008, p.29), yang mengemukakan bahwa perbedaan status sosial meliputi “antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, atau antara atasan dan bawahan”.

Konflik sosial tersebut di atas merupakan konflik yang nyata karena bersumber dari masyarakat dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai dengan Perum Perhutani BKPH (Badan Pengelola Hutan) Toffo Pajo Soromandi mengecewakan dan mengkhawatirkan masyarakat, yang menjadikan

kawasan hutan lindung sebagai kebutuhan hidup. Jika dibiarkan, konflik akan meningkat, dan kemungkinan konfrontasi tidak dapat dikesampingkan.

Seperti yang dinyatakan Coser dalam Ritzer dan Goodman (2011, p.65), konflik nyata adalah konflik yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap persyaratan khusus yang terjadi dalam hubungan dan perkiraan kemungkinan kepentingan peserta, dan ditunjukkan kepada objek pertimbangan untuk menjadi menjengkelkan.kecewa.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang gambaran persoalan konflik yang ada di masyarakat Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Konflik Masyarakat dengan Perhutani akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu (Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu).”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:. Bagaimanakah Konflik Masyarakat Desa Soriutu dengan Perhutani akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui awal dari terjadinya Konflik Masyarakat Desa Soriutu dengan Perhutani akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kali penelitian dilakukan, pasti ada manfaatnya untuk menikmati hasil akhirnya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi tentang pentingnya hutan bagi kelestarian alam.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai konflik antara masyarakat dengan Perhutani akibat penguasaan lahan hutan di Kabupaten Dompu.

3. Manfaat Lainnya

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 Studi Manajemen Publik di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan keadaan yang berbeda, namun masih berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai acuan dan pembanding untuk penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dapat ditelaah sebagai berikut:

Pertama, Luqman (2013, hlm. 93) yang diambil dari skripsi program studi geografi FPIPS UPI tahun 2013 mengenai “Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Pesisir kota Cirebon” Mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan mangrove disebabkan oleh aktivitas warga sekitar yaitu pemukiman dan tambak, sehingga hutan mangrove menjadi rusak..

Kedua, . Kajian lainnya dilakukan oleh Rustandi (2013, hlm.102) yang diambil dari skripsi program studi geografi FPIPS UPI tahun 2013 mengenai “Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” Hal ini menunjukkan bahwa akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman telah terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar di atas lahan seluas 407,1 hektar. Alih fungsi lahan ini telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, sehingga lebih maju dan meningkatkan mata pencaharian..

Ketiga, Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat2. (2016) melakukan penelitian tentang Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan. Menemukan bahwa program PKPH dijalankan oleh Perum Perhutani dan

masyarakat desa hutan Desa Kucur dengan berlandaskan kesepakatan perjanjian yang isinya menjelaskan pengelolaan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan aksesibilitas untuk masyarakat desa hutan yang ingin ikut PKPH dijalankan secara adil dan terbuka.

Keempat, Teguh Pramono, Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Fitri Windrad (2019) melakukan penelitian tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Menemukan keberadaan hutan lindung dan hutan produksi di pemukiman masyarakat tetangga selalu penuh dengan konflik. Konflik tersebut dapat berupa perusakan lingkungan, perusakan hutan, pencurian hasil hutan, atau bahkan terjadinya bencana alam. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan Perhutani yang memberdayakan masyarakat sekitar hutan, Anda dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik. Selain berbagai manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat.

Kelima, Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Kemitraan Kehutana Antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara. Menemukan Bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total nilai 7 yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan kehutanan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak lahan hutan yang telah dikonversi menjadi lahan komersial, salah satunya adalah lahan yang memenuhi

kebutuhan ekonomi masyarakat. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, harus ada solusi.

Untuk lebih jelas dapat di petakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Pemetaan hasil penelitian terdahulu:

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Luqman 2013, hlm. 93	Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Pesisir kota Cirebon	Hal ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan mangrove disebabkan oleh aktivitas warga sekitar yaitu pemukiman dan tambak, serta rusaknya hutan mangrove.
2	Rustandi 2013, hlm.102	Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	Hal ini menunjukkan bahwa akibat alih fungsi lahan yang terjadi ketika lahan pertanian digunakan untuk pemukiman, terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar di area seluas 407,1 hektar. Alih fungsi lahan ini telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, sehingga lebih maju dan meningkatkan mata pencaharian.
3	Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat 2. 2016	Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi kasus program PKPH di desa kucur dau, kabupaten malang)	Program PKPH ternyata dijalankan oleh masyarakat desa hutan di desa Perum Perhutani dan Kucur berdasarkan kesepakatan yang menjelaskan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan.

Sumber: Luqman 2013, hlm. 93, Rustandi 2013, hlm.102, Eko Edi Prastyo,

Kliwon Hidayat2. 2016

Lanjutan **Tabel 2.1.** Pemetaan hasil penelitian terdahulu

			masyarakat. Sedangkan aksesibilitas untuk masyarakat desa hutan yang ingin ikut PKPH dijalankan secara adil dan terbuka.
4	Teguh Pramono. Rizki Yudha Bramantyo. Irham Rahman. Fitri Windrad 2019	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. (<i>Studi implementasi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. No.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan</i>)	Keberadaan hutan lindung dan hutan produksi di dekat pemukiman masyarakat sarat dengan konflik. Konflik tersebut dapat berupa perusakan lingkungan, perusakan hutan, pencurian hasil hutan, atau bahkan terjadinya bencana alam. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan Perhutani, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik. Selain berbagai manfaat lain yang dirasakan masyarakat.
5	Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno 2018	Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara	Menemukan Bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total nilai 7 yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan kehutanan

Sumber: Teguh Pramono. Rizki Yudha Bramantyo. Irham Rahman. Fitri Windrad 2019, Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno 2018

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konflik

Analisa dari konflik, dalam *International Encyclopaedia Of The Social Sciences* Vol. 3 (halaman 236) menjelaskan definisi konflik dari perspektif antropologi. Konflik disebabkan oleh persaingan antara setidaknya dua pihak, yang masing-masing dapat berupa individu, keluarga, kelompok kerabat, komunitas, atau kelas sosial ideologis. , organisasi politik, bangsa atau penganut agama tertentu. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam konflik mencakup berbagai bentuk dan skala. Lebih lanjut Mulyadi (2002) mengemukakan bahwa jika kita mencermati kehidupan sosial, komponen utamanya adalah interaksi antar anggota. Mengenai interaksi antar anggota, beberapa jenis telah ditemukan. Jenis umum interaksi sosial meliputi kerjasama, persaingan, dan perselisihan. Ketiga komponen ini akan saling terkait.

Di sisi lain, menurut Bambang Widodo Umar (2010), ada beberapa cara untuk menangani konflik sosial (gaya manajemen konflik), yaitu:

- a. Negosiasi kompromi (negosiasi) adalah cara penyelesaian konflik di mana tidak ada pihak yang menang atau kalah (metode *nenwin* atau *losslose*). Pihak-pihak yang berkepentingan saling memberikan konsesi atau saling konsesi. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan tetapi tidak lengkap dan kalah tetapi tidak lengkap.

- b. Sesuaikan (puas diri), lunakkan (lembutkan), patuhi (puas diri). Metode ini adalah metode win-win. Konflik diredam dengan mengakomodir berbagai kepentingan orang-orang yang berkonflik, salah satu pihak melepaskan dan menyimpan apa yang diinginkannya, sehingga pihak lain dapat sepenuhnya memperoleh apa yang diinginkannya.
- c. Kerjasama atau *collaborating* melawan atau *confronting*. Kedua belah pihak bekerja sama untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Metode ini adalah metode win-win. Dalam solusi ini, pihak-pihak yang berkonflik diundang ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah yang diperlukan.
- d. Menghindari atau *Avoidance*. Konflik di kendalikan dengan cara membatasi waktu atau membagi wilayah agar masing-masing kelompok tidak saling benturan satu sama lain dan agar bentrokan tidak semakin meluas atau *win-lose approach*.
- e. Bersaing atau *competing*, Menguasai atau *dominating*, memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah (*win-lose approach*). Cara ini dengan mengorbankan pribadi dan kepentingan pihak lain tetapi ada aturan permainannya, yakni dalam system kompetisi.

2.2.2 Hutan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa sebidang tanah yang mengandung sumber daya alam hayati, dan lingkungan alamnya yang didominasi oleh pepohonan dan tidak dapat dipisahkan. .

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penempatan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga merupakan satu kesatuan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian hutan di sini mengikuti konsep hukum vertikal, karena bidang (tanah), pepohonan, flora dan fauna serta lingkungan merupakan satu kesatuan yang utuh. Keputusan pemerintah tentang hutan sangat penting, karena dengan keputusan pemerintah, keadaan hutan menjadi sangat kuat.

Adapun dua arti penting penempatan pemerintah tersebut, yaitu :

1. Membuat kawasan hutan yang tidak seluruhnya dibuka, ditempati atau dikerjakan secara sewenang-wenang. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan wajib mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan pemanfaatan hutan, serta menjaga dan melindungi hutan sesuai dengan fungsinya.

2. Hutan memiliki fungsi ganda dan berperan penting dalam melindungi air dan tanah, menjaga suasana yang sehat, dan menjaga keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan. Kelestarian dan keberadaan hutan bergantung pada sejauh mana kita mengenali dan melindungi nilai-nilai ekologi, sosial dan ekonominya. Manfaat ini harus dimasukkan dalam sistem neraca nasional yang digunakan untuk mengukur pilihan pembangunan (Yusuf et al., 2011). Pentingnya dan peran hutan memainkan peran yang cukup besar dalam pemeliharaan kualitas dan ketertiban lingkungan, serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan pajak nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya hutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat memelihara dan meningkatkan fungsi dan fungsi hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

2.2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari persoalan pertanahan atau konflik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi, sosial, ekologi dan lahan pertanian. Karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan, konflik dapat terjadi di kawasan hutan (Sylviani dan Hakim, 2014). Suryandari dan Sylvani (2010) juga menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang buruk merupakan penyebab terjadinya konflik kawasan hutan, oleh karena itu diperlukan kelembagaan yang dapat mengelola kawasan hutan secara lestari.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai kelestarian hutan.

Salah satu isi dasar pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah melaksanakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) harus dirancang sesuai dengan kondisi tapak sehingga pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dapat mencapai pengelolaan hutan lestari (Supratman, 2008). Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan rangkaian proses perencanaan atau persiapan rancangan kawasan hutan, berdasarkan fungsi dan nama pokoknya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan bagian dari penguatan sistem pengelolaan hutan nasional, provinsi, dan daerah. UMF didirikan untuk menyediakan platform bagi kegiatan pengelolaan hutan yang efisien dan berkelanjutan (Moyo et al., 2013). Pelaksanaan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menghadapi banyak permasalahan baik dari sisi sistem maupun masyarakat.

Isu kelembagaan meliputi kendala pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan, organisasi, dana, dan sumber daya manusia (SDM). Isu sosial lebih cenderung pada kebutuhan lahan masyarakat dan berbagai jenis tanaman yang akan dikembangkan di areal percontohan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Alviya dan Suryandari, 2008). Faktor-faktor yang

mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dibentuk oleh organisasi KPHP adalah faktor komunikasi, sumber daya dan birokrasi (Hamzah, 2014).

2.2.4 Penguasaan Lahan

Kelestarian hutan dan kehidupan ekonomi masyarakat Lincun merupakan dua isu penting (Mustofa, 2011). Masyarakat di sekitar hutan masih berada dalam kemiskinan, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan di bidang kehutanan dan kehutanan, yang merupakan kendala yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perlindungan hutan (Ramadoan et al., 2013). Areal yang direklamasi oleh masyarakat untuk pemukiman dan pertanian menunjukkan bahwa kondisinya tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan (Sylviani dan Suryandari, 2013). Status ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat menentukan derajat penanaman masyarakat di dalam hutan. Luas lahan garapan di dalam hutan ditentukan oleh tekanan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Tekanan ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui pertanian di hutan (Subarna, 2011).

2.2.5 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah penggunaan cara dan teknik pengelolaan hutan pada saat melakukan kegiatan di kawasan hutan. Pengelolaan hutan

lestari harus mencakup berbagai fungsi teknis, keuangan, personal, administratif dan kepemimpinan yang terkait dengan unsur-unsur pengelolaan (POAC).

Beberapa unsur manajemen tersebut yaitu:

- a. perencanaan (*Planning*) adalah kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi maupun kelompok.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) adalah implimentasi dari perencanaan dan pengorganisasian dimana seluruh komponen bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) merupakan pengendalian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien. (Hasibuan, 2009).

2.2.6 Kerangka konsep penelitian

Kerangka penelitian ini dimulai dengan kondisi hutan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, ketika kualitas dan kuantitas hutan dan hasil bumi semakin menurun. Penyebab penurunan tersebut adalah karena aktivitas seperti penebangan liar, perambahan dan perubahan penggunaan lahan atau konversi menjadi lahan pertanian atau ladang jagung, dan semua pohon yang

ada gundul. Penanaman liar yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan secara berlebihan atau berlebihan menyebabkan kerusakan kawasan hutan yang serius. Bukan Amerika Serikat. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan sektor kehutanan nasional. Selain itu, untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar, seluruh hutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, telah diatur oleh rakyat yang dikuasai oleh negara.

Maka dari itu Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi dan masyarakat Desa Soriotu diharapkan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Penelitian konflik antara masyarakat dengan perhutani di kabupaten dompu ini dilakukan untuk melihat proses cara atau solusi dalam menyelesaikan konflik dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah melalui metode kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk statistik, melainkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, arsip pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Menurut David William dalam Moleong (2006:5), ia menulis bahwa “penelitian kualitatif adalah penyelidikan yang menggunakan lingkungan alam, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi, dan melibatkan berbagai metode yang ada.” Selain itu, menurut Moleong (2006:6) mengatakan, “Penelitian kualitatif adalah sejenis peneliti yang tujuannya untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan berupa kata-kata dan bahasa. Dalam konteks alami tertentu, berbagai metode alami digunakan untuk menggambarkan”. Melalui metode penelitian ini, penulis merasa mudah untuk diteliti, karena data yang dikumpulkan oleh penulis bukanlah data statistik.

Menurut menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2002:17), penelitian kualitatif adalah “penyelidikan yang lebih menekankan pada makna dan proses, pengungkapan lingkungan alam, dan digunakan sebagai sumber data langsung dari sumbernya sendiri. peneliti, sebagai alat kunci.” Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan konflik antara masyarakat dan Perhutani yang disebabkan oleh pendudukan hutan di Kabupaten Dompu, dan

faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan Perhutani. Menempati hutan di Kabupaten Dongpu.

Penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, tetapi hasil yang diharapkan juga akan mengungkapkan nilai yang tersembunyi. Selain itu, penyelidikan ini akan lebih sensitif. 18) “Penelitian deskriptif hanyalah informasi deskriptif kualitatif, berusaha menjaga keutuhan objek yang diselidiki secara relatif.

Menurut Faisal (2005: untuk melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) Sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”. Lebih Faisal (2005:20) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soro Mandi Kantor Resort Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan selesai. Dipilihnya lokasi ini karena peneliti merasa mudah mendapatkan informasi yang lebih akurat, karena peneliti berasal langsung dari desa tempat penelitian dan termasuk pelaku juga dalam perabasan hutan tersebut.

3.3 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berkaitan erat dengan faktor konseptual. Sehingga Anda bisa mendapatkan informasi atau data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah untuk menentukan rincian yang ditemukan dalam konteks yang ada dan mengekstrak informasi sebanyak mungkin dari orang dalam untuk digunakan sebagai dasar untuk desain dan teori yang muncul.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknologi snowball sampling atau teknologi bola salju. Menurut Sutopo (2002: 370), “Survei dengan menggunakan teknologi snowball sampling adalah survei yang tidak direncanakan, penggalan informasi dari informan, kemudian ditunjukkan kepada informan kedua dan ketiga sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam”. Snowball sampling adalah untuk memperbaiki informasi yang ada, sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah responden, dan lebih mengutamakan mereka yang memiliki pemahaman masalah yang detail.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pihak pengelola Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH), Kepala Desa Soriutu dan masyarakat yang berada di Desa Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, serta informan lain yang dianggap mempunyai hasil mendetil.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer, Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146) “Data asli adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (bukan melalui cara perantara)”. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara langsung antara peneliti dengan orang dalam
- b. Data Sekunder, Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) adalah “sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data tambahan termasuk surat kabar, undang-undang terkait layanan, daftar tamu, dll.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang diciptakan manusia dalam penelitian umumnya adalah responden (responden). Sebagai individu yang memiliki informasi, letak sumber data berupa orang (resource person) sangatlah penting. Peneliti dan nara sumber memiliki status yang sama di sini, sehingga nara sumber tidak hanya menjawab pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat memilih untuk menyajikan arah dan cita rasa informasi yang mereka miliki (Sutopo, 2006 : 5758).

Menurut penelitian Lofland (1984: 47), sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen. Kata-kata dan perbuatan orang-orang yang

diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio tape, foto atau film (Moleong, 2007:157). Peneliti berusaha untuk menyesuaikan bidang penelitian yang menjadi subjek penelitiannya. Peneliti mengumpulkan data secara induktif dan kumulatif, kemudian menghasilkan laporan yang lebih komprehensif. Laporan dibuat dengan mengelompokkan data serupa dan diberi kode terpisah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen (pengumpulan bukti, seleksi, pengolahan, dan penyimpanan informasi).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi terdiri dari pengumpulan data secara sadar dan sistematis dengan menggunakan prosedur yang baku (Suharsimi Arikunto, 2010: 265). Observasi adalah cara menerima data, yang dicapai dengan mengamati peristiwa dan mencatat secara sistematis fenomena yang dipelajari. Observasi tidak hanya menentukan orang yang diwawancarai, tetapi juga latar belakang, fakta, dan prosesnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi, melalui pertanyaan dan jawaban lisan, tatap muka secara sepihak, dan dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sudijono (1996:82) memiliki beberapa kelebihan dalam pengumpulan data melalui wawancara, di antaranya pewawancara dapat langsung menghubungi partisipan yang dinilai, data yang diperoleh lebih mendalam, dan yang diwawancarai dapat mengungkapkan perasaan terdalamnya secara lebih luas. pertanyaan. jelas dapat diulang dan diselesaikan dengan cara yang lebih bermakna.

3. Dokumentasi

Arikunto (2002:206) Metode dokumen terdiri dari pencarian data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dll. Nawawi (2005: 133) mencatat bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data melalui warisan tertulis, terutama dalam bentuk arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat dan argumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:248), analisis data terdiri dari pengolahan data, pengorganisasian, pengkategorian menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, menemukan dan menemukan pola, menemukan hal-hal penting, dan belajar Mencoba untuk membuat sesuatu terjadi. Dan memutuskan apa yang harus dikatakan kepada orang lain. Oleh karena itu, data yang terkumpul dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan atau dokumen dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara.

Sebagian program analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Milles dan Huberman (2000:1521), yaitu analisis interaktif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi dengan mewawancarai key insiders yang sesuai dengan penelitian, kemudian melakukan observasi langsung di lapangan untuk mendukung penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, transformasi data perkiraan yang dihasilkan oleh cacat lapangan selama proses penyelidikan, dan tujuannya adalah untuk melakukan transkripsi data (transformasi data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan permasalahan. Terjadi di tengah adegan.

- c. Penyajian data (visualisasi data) adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman penelitian tentang informasi yang dipilih, kemudian disajikan dalam tabel atau deskripsi penjelas. Penyajian atau visualisasi data dirancang untuk memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau sebagian dari penelitian.
- d. Untuk mencapai suatu kesimpulan (verifikasi) adalah dengan mencari pola penjelas, kemungkinan konfigurasi, jalur sebab akibat dan makna dari proposisi. Verifikasi dalam penelitian kualitatif telah dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian sejak memasuki lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan menemukan makna dari data yang terkumpul.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dan memungkinkan adanya interpretasi hasil penelitian, maka perlu dilakukan triangulasi. Menurut Moleong (2011: 330), “Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi keabsahan data, yang menggunakan hal-hal lain selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data”. Menurut Danzini dalam Moleong (2011: 330), “Keempat triangulasi adalah teknik yang menggunakan sumber, metode, peneliti dan teori untuk memverifikasi keabsahan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dan font. Menurut Barton dalam Moleong (2011: 330), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari waktu ke

waktu dan kepercayaan dari alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Menurut sumber Moleong (2011:331), validitas data verifikasi dapat diperoleh melalui metode berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.